STRATEGI *MEDIA RELATIONS* HUMAS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Diajukan Oleh:

KHARINA ZABILAH PUTERI
NIM. 07011282126098

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

STRATEGI *MEDIA RELATIONS* HUMAS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Persyaratan Dalam Menempuh Derajat

S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

KHARINA ZABILAH PUTERI
NIM. 07011282126098

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 16 Mei 2025

Pembimbing

Lisa Mandasari, S.IP., M.Si .....

NIP. 198603272023212029

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"Strategi *Media Relations* Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Transparansi Informasi Publik"

Skripsi

Oleh :
Kharina Zabilah Puteri
07011282126098

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 23 Juni 2025

Pembimbing :

Tanda Tangan

1. Lisa Mandasari, S.IP., M.Si
   NIP. 198603272023212029

Penguji :

Tanda Tangan

1. Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
   NIP. 198801272019031005
2. Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si
   NIP. 198902222023212044

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORSINALISTAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharina Zabilah Puteri

NIM : 07011282126098

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Strategi *Media Relations* Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Transparansi Informasi Publik" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menaggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sunguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Inderalaya, 23 Mei 2025

Kharina Zabilah Puteri

NIM. 07011282126098

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Tuhan tahu waktu yang tepat, tempat yang tepat dan jawaban yang tepat untuk semua doa-doa kita"

-Rony Parulian

"Hanya karena prosesmu lebih lama dari orang lain bukan berarti kamu gagal"

-Jihoon Treasure

"Semua proses menuju kesuksesan pasti akan jatuh bangun, jika kamu terus berusaha suatu saat pasti kamu akan bersinar layaknya bintang di langit"

-Doyoung Treasure

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Arno Johardi dan Ibu Eliza Oktaviani
2. Saudara-saudara saya
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan saya
4. Seluruh dosen, pegawai, dan staff Jurusan Administrasi Publik
5. Almamater kebanggaanku
6. Diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi sampai akhir

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Strategi *Media Relations* Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Transparansi Informasi Publik” sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis guna memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing serta memberikan pengarahan dalam membuat skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Lisa Mandasari, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dan mendalam selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, motivasi, dan perhatian yang telah diberikan.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, didikan, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama menempuh studi.

7. Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang telah membimbing dan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Arno Johardi dan Ibu Eliza Oktaviani yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT selalu memberkahi Ayah dan Ibu dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan yang tiada habisnya.
10. Seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabat saya Meccy, Wati, dan Anisa yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
12. Teman seperjuangan Tria, Viona, dan Balqis serta seluruh teman-teman Angkatan 2021 Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan semangat, dukungan dan berbagi infomasi selama penyusunan skripsi ini.
13. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota grup Treasure dan EXO, khususnya Doyoung dan Chanyeol, serta kepada Rony Parulian, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi melalui karya-karya mereka. Dukungan tidak langsung yang diberikan telah memberikan semangat dan dorongan positif selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena masih memiliki kekurangan, baik dalam hal isi maupun sitematika dan teknik penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Inderalaya, Mei 2025

Kharina Zabilah Puteri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *media relations* yang diterapkan oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan transparansi informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian, strategi *media relations* yang dijalankan telah berjalan cukup baik melalui komunikasi terbuka, kerja sama profesional dengan media, serta pemanfaatan berbagai saluran informasi. Humas tidak hanya memberikan akses informasi secara terbuka dan tepat waktu, tetapi juga responsif terhadap kritik dan isu sensitif. Strategi ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengelolaan relasi, pengembangan strategi komunikasi, dan pengembangan jaringan. Ketiganya menunjukkan komitmen Humas terhadap keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan komunikasi dua arah yang konstruktif. Meskipun terdapat kendala teknis seperti pembaruan website dan belum tersedianya fitur pengaduan online, secara keseluruhan strategi ini mampu membangun hubungan media yang mendukung transparansi berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi *media relations* Humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan berperan penting dalam memperkuat transparansi informasi publik.

Kata kunci: *media relations*, humas, transparansi informasi publik, DPRD, komunikasi publik

Pembimbing

Lisa Mandasari, S.IP., M.Si

NIP. 198603272023212029

Inderalaya, Mei 2025

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to analyze the media relations strategy implemented by the Public Relations of the South Sumatra Provincial DPRD Secretariat in increasing the transparency of public information. Based on the results of the study, the media relations strategy implemented has been quite good through open communication, professional cooperation with the media, and the use of various information channels. Public relations not only provides open and timely access to information, but is also responsive to criticism and sensitive issues. This strategy includes three main dimensions, namely relationship management, communication strategy development, and network development. All three demonstrate Public Relations' commitment to information transparency, public participation, and constructive two-way communication. Although there are technical obstacles such as website updates and the unavailability of online complaint features, overall this strategy is able to build media relations that support sustainable transparency and increase public trust. Thus, the media relations strategy of the South Sumatra Provincial DPRD Public Relations plays an important role in strengthening the transparency of public information.

Keywords: media relations, public relations, public information transparency, DPRD, public communication

Advisor

Lisa Mandasari, S.IP., M.Si

NIP. 198603272023212029

Inderalaya, May 2025

Head Of Public Administration Departement

Faculty Of Social and Political Science

Sriwijaya University

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN ORSINALISTAS ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Rumusan Masalah **15**
1.3 Tujuan Penelitian **15**
1.4 Manfaat Penelitian **15**
BAB II **17**
TINJAUAN PUSTAKA **17**
2.1 Landasan Teori **17**
2.2 Strategi **17**
2.2.1 Definisi Strategi **17**
2.2.2 Jenis-jenis Strategi **19**
2.2.3 Tingkatan Strategi **20**
2.2.4 Strategi Humas **21**
2.2.5 Teori-teori Strategi **23**
2.3 *Media Relations* **30**
2.3.1 Definisi *Media Relations* **30**
2.3.2 Tujuan *Media Relations* **31**
2.4 Transparansi Informasi Publik **32**
2.4.1 Definisi Transparansi Informasi Publik **32**

2.4.2 Prinsip-prinsip Transparansi 34
2.4.3 Karakteristik Transparansi 35
2.5 Humas Pemerintah 36
2.5.1 Definisi Humas Pemerintah 36
2.5.2 Tugas Humas dalam Pemerintahan 37
2.6 Teori Strategi yang Digunakan 38
2.7 Penelitian Terdahulu 40
2.8 Kerangka Pemikiran 46
BAB III 47
METODE PENELITIAN 47
3.1 Jenis Penelitian 47
3.2 Definisi Konsep 47
3.3 Fokus Penelitian 48
3.4 Jenis dan Sumber Data 51
3.4.1 Jenis Data 51
3.4.2 Sumber Data 51
3.5 Informan Penelitian 52
3.6 Teknik Pengumpulan Data 52
3.6.1 Wawancara 52
3.6.2 Observasi 53
3.6.3 Dokumentasi 53
3.7 Teknik Analisis Data 53
3.8 Teknik Keabsahan Data 55
3.9 Sistematika Penulisan 56
BAB IV 58
HASIL DAN PEMBAHASAN 58
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian 58
4.1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 58
4.1.2 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 59
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Setiap Sub Bagian 60
4.2 Deskripsi Informan Penelitian 64
4.3 Hasil Penelitian 65
4.3.1 Mengelola Relasi 65
4.3.2 Mengembangkan Strategi 79

4.3.3 Mengembangkan Jaringan 91
4.4 Pembahasan/Diskusi 102
4.4.1 Mengelola Relasi 102
4.4.2 Mengembangkan Strategi 103
4.4.3 Mengembangkan Jaringan 104
BAB V 113
PENUTUP 113
5.1 Kesimpulan 113
5.2 Saran 115
5.2.1 Saran Teoritis 115
5.2.2 Saran Praktis 115
DAFTAR PUSTAKA 117
LAMPIRAN 121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Media Cetak yang bekerja sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan 4
Tabel 1.2 Daftar Media Online yang Bekerja Sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan 5
Tabel 1.3 Daftar Media Elektronik yang Bekerja Sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan 7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 41
Tabel 3.1 Fokus Penelitian 49
Tabel 3.2 Informan Penelitian 52
Tabel 4.1 Deskripsi Informan Penelitian 64
Tabel 4.2 Matriks Hasil Temuan 106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Berita tentang Rapat Paripurna, Komisi, & Aspirasi Masyarakat yang Dipublikasikan Pada Website Resmi dan Akun Instagram Resmi..... 10
Gambar 1.2 Tampilan Website Resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang Tidak Ada Fitur Pengaduan Online..... 11
Gambar 1.3 Contoh Berita tentang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang Dipublikasikan Tidak Tepat Waktu..... 12
Gambar 1.4 Contoh Berita tentang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang Menggunakan Istilah Teknis..... 14
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 60
Gambar 4.2 Dokumentasi Pertemuan Humas dan Media 67
Gambar 4.3 Dokumentasi Media Publikasi Majalah, Surat Kabar & Berita Online 86
Gambar 4.4 Tampilan Media Sosial dan Website Resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan 97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 121
Lampiran 2. Transkrip Wawancara 128
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara 147
Lampiran 4. SK Dosen Pembimbing Skripsi 149
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian 150
Lampiran 6. Surat Balasan Izin Penelitian 151
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi 152
Lampiran 8. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi 153
Lampiran 9. Kartu Bimbingan Skripsi 154
Lampiran 10. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif 155
Lampiran 11. Surat Keterangan Pengecekan Similarity 156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi menjadi prinsip penting dalam pemerintahan yang efektif, karena membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan akses terbuka terhadap informasi. Dalam negara hukum yang demokratis, informasi terbuka mendorong akuntabilitas, keterlibatan publik, dan pemantauan kebijakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Asshidiqie, 2003). Transparansi juga memungkinkan masyarakat untuk memantau kemajuan pemerintah secara objektif dan menjalankan kontrol yang lebih besar terhadap para pembuat kebijakan (Kristianten, 2006). Dengan demikian, transparansi informasi sangat penting bagi keberhasilan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tanggung jawab pemerintah dalam membagikan akses terhadap informasi terbuka yang lugas, tepat, dan tersedia secara bebas untuk publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diharapkan dapat membuat pemerintah, baik di tingkatan federal ataupun daerah, lebih transparan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, khususnya dalam hal penyediaan informasi. Akan tetapi, transparansi berdasarkan undang-undang ini memiliki beberapa batasan. Informasi publik yang jika diungkap atau disampaikan kepada pemohon informasi bisa mengganggu kelancaran jalannya penegakan hukum, seperti informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Informasi mencakup materi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional,

seperti strategi militer dan intelijen. Data publik yang berpotensi mengancam kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual serta pencegahan praktik persaingan usaha yang tidak fair. Data yang berpotensi mengganggu stabilitas publik dan ekonomi nasional, seperti rencana kebijakan moneter sebelum diumumkan, juga dibatasi. Hak privasi individu dilindungi, termasuk catatan medis, data keuangan pribadi, dan informasi rahasia dalam kemitraan profesional seperti advokat-klien. Informasi yang berisiko menimbulkan kerugian dalam interaksi dan kerja sama dengan negara lain seperti korespondensi diplomatik antarnegara. Nota dinas atau surat internal antar instansi publik yang diklasifikasikan sebagai rahasia, kecuali atas ketetapan resmi Komisi Informasi atau pengadilan. Meskipun ada batasan ini, transparansi informasi diimbangi dengan perlindungan kepentingan negara, keamanan, dan hak individu.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah satu institusi pendukung fungsi legislasi, mempunyai kewajiban besar untuk memastikan masyarakat mendapat informasi mengenai operasional dan kebijakan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai lembaga legislatif, DPRD Provinsi Sumatera Selatan memainkan peran penting dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang kesemuanya terkait langsung dengan kepentingan publik. Dengan demikian, masyarakat perlu untuk memahami kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar dapat memberikan masukan yang konstruktif dan berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sangatlah penting. Dalam kerangka administrasi publik, humas memegang peranan penting dalam membina hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat. Humas

pemerintah biasanya menyampaikan informasi berupa berita mengenai program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah, baik yang telah dilaksanakan, sedang berlangsung, maupun akan dilakukan oleh lembaga tersebut (Anam et al., 2022). Tujuan humas adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara rinci, jujur, dan tepat pada waktunya. Dengan kinerja yang efektif, humas mampu membantu masyarakat dalam memahami kebijakan, program, atau kegiatan yang dilaksanakan, serta mengembangkan kepercayaan dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam penyampaian data publik.

Beberapa pendekatan yang digunakan Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam proses penyampaian informasi publik yaitu *media relations*, yaitu upaya mendukung publikasi dan penyebaran informasi melalui kolaborasi antara humas dan media, yang dilakukan melalui berbagai program kerja untuk menjamin kelancaran komunikasi antara humas dan masyarakat melalui media. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menjalin kontak dengan media (*media relations*), yang terlihat dari keterlibatannya dengan berbagai media cetak, elektronik, dan online. Media berperan sebagai penghubung penting antara Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan masyarakat. Informasi tentang aturan dan program legislatif dapat disebarluaskan secara transparan, tepat waktu, dan akurat dengan kerja sama yang erat. Oleh karena itu, hubungan kerja yang positif antara humas dan media penting sekali untuk membangun tata kelola pemerintahan yang jelas dan tanggap.

Untuk menjadi media partner DPRD Provinsi Sumatera Selatan, media hanya perlu mengajukan proposal kerja sama kepada humas, dan kedua pihak akan mencapai kesepakatan sesuai kontrak yang disepakati. Informasi yang penulis kumpulkan

mengenai daftar media yang telah bermitra dengan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama 6 hingga 12 bulan, antara lain media cetak, internet, dan elektronik, yaitu:

Tabel 1.1 Daftar Media Cetak yang bekerja sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Media	No	Nama Media
1	Majalah Aksi	21	Majalah Radar
2	Mayapada	22	Medconas
3	Media Rakyat	23	Media Sriwijaya
4	Medium	24	Metro
5	Misi Media	25	Nagara
6	NBM	26	News Hunter
7	Nusantara Global	27	Oku Satu
8	Palembang Ekspress	28	Pelita Sriwijaya
9	Persada Ekspress	29	Prodesa
10	Real News	30	RMol
11	Rotasi	31	Sentral Post
12	SN	32	Sniper
13	Sripo	33	Sriwijaya Ekspress
14	Sriwijaya Times	34	Star Inti
15	Suara Nusantara	35	Sumatera Ekspress
16	Sumsel 24	36	Sumsel Net Media
17	Sumsel Pers	37	Torang
18	Transparan	38	Tribun Sumsel
19	Trik Post	39	Warta Musi
20	Yoka		

Sumber: Bagian Humas dan Protokol DPRD Provinsi Sumsel Tahun 2025

Istilah “media cetak” mengacu pada jenis media massa yang menyebarkan informasi melalui media fisik, seperti surat kabar. Media telah mengalihkan fokusnya dari statistik ke konten visual. Salah satu jenis media cetak yang pernah diterbitkan

oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah Majalah Kabar Legislatif, Tabloid Wakil Rakyat, dan Surat Kabar.

Tabel 1.2 Daftar Media Online yang Bekerja Sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Media	No	Nama Media
1	Bom Info	46	Halo Pos
2	Big Info	47	Arung Media
3	Sangsaka	48	Warta Reformasi
4	Sumsel Online Siar	49	Tribun Sumsel
5	Berita Lima Info	50	Tribun Pos
6	Suara Publik	51	TNT.co
7	Widea Zone	52	The 8 News
8	Media Advokasi	53	Sonora
9	Jarrak Pos	54	Pos Kita
10	Pelita Sumatera.com	55	Nagara
11	Pelita Sumatera.id	56	Lamanqu
12	Sumsel Q	57	Laju Sumsel
13	Sumsel 78	58	Koran Indonesia
14	Fokus Sumsel	59	Klik Sumatera
15	Palpos.id	60	Jelajah Sumsel
16	Sumeks.co	61	Jelajah Kepri
17	Palpress	62	Investigasi Bhayangkara
18	Detak Palembang	63	Media Info Korupsi
19	Croscek	64	Gelagat
20	Ampera News	65	Ampera.co
21	Viral Sumsel	66	Sentral News
22	Intens	67	Pijar Musa
23	Sumsel Terkini	68	Minus Time
24	Sumsel Independen	69	Gema Pembaharuan
25	Pena Cakrawala	70	Meteor Sumatera
26	Sumsel Update	71	Sriwijaya Media

27	Sumsel.24	72	Maklumat News
28	ForNews	73	Rehat
29	Musi News	74	Integritas Media
30	Inilah Sumsel	75	Sibernas
31	Berita Sebelas	76	Lentera Pendidikan
32	Mata Publik	77	Gerbang Kepri
33	Matta News	78	Populasi News
34	Media Otentik	79	Divia News
35	Inti News	80	Koran Rakyat
36	Koran Musi	81	Berita Pagi
37	Berita Musi	82	Loda News
38	Wahana Informasi	83	Rimau
39	Suara Sumsel	84	Haluan Sumatera
40	Haluan Sumsel	85	Garuda Pos
41	Buana Indonesia	86	Liputan Sumsel
42	Ulasan	87	Plat Merah
43	Bidik Sumsel	88	Kabar 28
44	Sumsel Net	89	GoSumsel
45	Sumatera News		

Sumber: Bagian Humas dan Protokol DPRD Provinsi Sumsel Tahun 2025

Media *online* adalah salah satu bentuk media digital yang menyebarkan informasi melalui berbagai saluran internet. Media ini disediakan dalam bentuk situs berita online yang merupakan platform digital untuk menyebarkan informasi dan berita seputar DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Situs berita online ini, seperti halnya surat kabar, dapat diperbarui hampir setiap hari berdasarkan perkembangan isu dan kegiatan di DPRD Provinsi Sumsel.

Tabel 1.3 Daftar Media Elektronik yang Bekerja Sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Media	No	Nama Media
1	I News TV	5	Sriwijaya Radio
2	Kompas TV	6	Sriwijaya TV
3	Smart FM	7	TVRI
4	Sonora FM		

Sumber: Bagian Humas dan Protokol DPRD Provinsi Sumsel Tahun 2025

Media elektronik adalah fasilitas atau perangkat yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengirimkan informasi atau berkomunikasi. Media jenis ini biasanya disiarkan melalui televisi atau radio. Salah satu keunggulan televisi dan radio dibandingkan media lainnya adalah jangkauannya yang luas dan mengudara secara simultan. Strategi publikasi operasional organisasi telah ditetapkan untuk memastikan kebijakan DPRD Provinsi Sumsel berhasil disosialisasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif mengamati, mengkritik, dan mengkomunikasikan ide dan ambisi dalam pembuatan kebijakan.

Selain menjalin kerjasama dengan media massa, situs web resmi juga merupakan bagian dari strategi media relations yang dilaksanakan oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Melalui situs web ini, pihak pemerintah dapat menyampaikan pernyataan pers, laporan keuangan, berita terkini, serta materi-materi yang relevan bagi wartawan atau media. Diketahui bahwa situs website resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu (https://dprd.sumselprov.go.id/). Website resmi ini dimaksudkan untuk memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat sekaligus menjadi saluran komunikasi antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan masyarakat umum. Transparansi dan keterbukaan informasi publik didasarkan pada hak masyarakat untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan, dan pemerintah

berkewajiban menyediakan informasi tersebut dengan memastikan informasi tersebut akurat dan mudah dipahami. Halaman resmi suatu lembaga mempunyai fungsi vital dalam menyebarkan informasi publik. Website saat ini memudahkan untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna, yang lebih memilih untuk mengakses informasi berdasarkan kebutuhan mereka (Priyatna et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Prayogi & Agung Prawijaya (2022) mengenai "Strategi *Media Relations* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur dalam Peningkatan Sarana Informasi Publik", Diketahui bahwa penyampaian informasi yang tepat waktu sangatlah penting. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan kecepatan akses informasi, lembaga bermaksud melakukan sosialisasi segera setelah informasi diterima. Kajian tersebut menunjukkan bahwa kualitas informasi yang diberikan harus memenuhi standar jurnalistik, meskipun diperlukan lebih banyak sumber daya manusia untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi pengolahan data. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *media relations* yang baik dalam penyampaian informasi dapat membantu meningkatkan transparansi informasi publik.

Peraturan yang mendukung keterbukaan informasi publik, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diterapkan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diakses oleh semua kalangan, baik secara fisik maupun dalam hal pemahaman. Berdasarkan pengamatan penulis selama proses magang 4 bulan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terdapat fenomena masalah seperti tidak dipublikasikannya berita secara berkala di website resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini terlihat pada berita tentang

rapat paripurna yang terakhir dipublikasikan di website resminya yaitu pada tanggal 14 Oktober 2024, padahal kenyataannya di akun instagram resmi humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu (@humasdprdprovsumsel) terdapat berita terbaru tentang rapat paripurna yang dipublikasikan pada tanggal 16 Desember 2024. Kemudian berita tentang Komisi yang terakhir dipublikasikan di website resminya yaitu pada tanggal 17 November 2021, padahal kenyataannya di akun instagram resmi humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat berita terbaru tentang Komisi yang dipublikasikan pada tanggal 24 Januari 2025. Tidak hanya itu, berita tentang aspirasi masyarakat yang terakhir dipublikasikan di website resminya yaitu pada tanggal 13 Maret 2022, padahal kenyataannya di akun instagram resmi humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat berita terbaru tentang aspirasi masyarakat yang dipublikasikan pada tanggal 6 Januari 2025. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa publikasi berita di website resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan tidak dilakukan secara rutin dan dapat menghambat transparansi, sehingga diperlukan evaluasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat dan terkini.

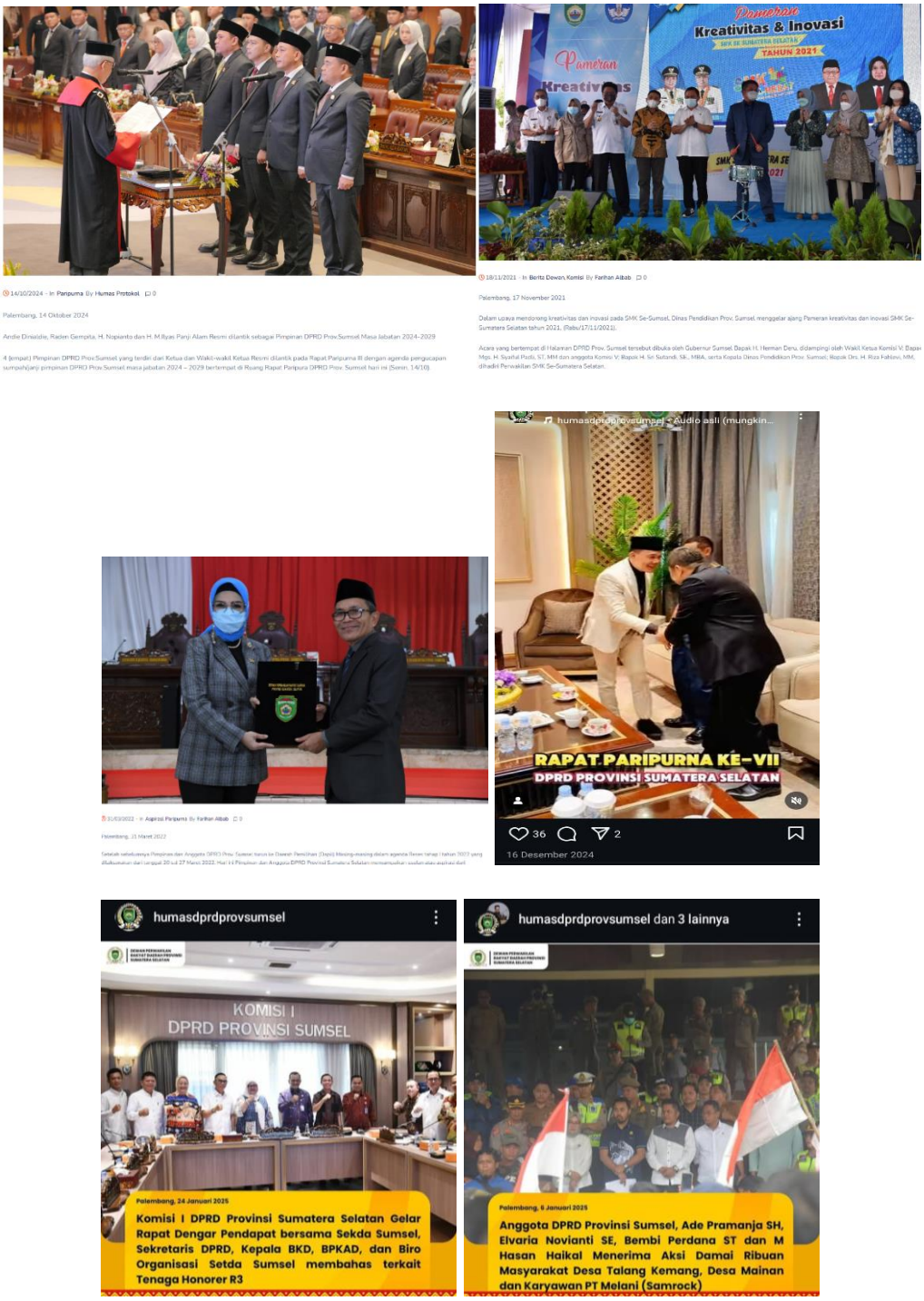

Gambar 1.1 Berita tentang Rapat Paripurna, Komisi, & Aspirasi Masyarakat yang Dipublikasikan Pada Website Resmi dan Akun Instagram Resmi

Sumber : https://dprd.sumselprov.go.id/, @humasdprdprovsumsel (2025)

Selain permasalahan tersebut, tidak adanya fitur interaktif seperti forum diskusi atau mekanisme pengaduan online pada website resmi DPRD Provinsi Sumatera

Selatan juga menjadi permasalahan dalam transparansi. Salah satu aspek penting dalam menciptakan transparansi adalah adanya saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya fitur interaktif, seperti forum diskusi atau mekanisme pengaduan online, DPRD Provinsi Sumatera Selatan kehilangan kesempatan untuk mendengarkan langsung suara dan keluhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan kebijakan meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum secara signifikan sekaligus mencapai kedaulatan rakyat yang lebih ideal (Jayanti, 2023). Dengan demikian, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus memprioritaskan pengembangan rencana *media relations* berbasis komunitas.

Gambar 1.2 Tampilan Website Resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang Tidak Ada Fitur Pengaduan Online

Sumber : https://dprd.sumselprov.go.id/ (2025)

Masalah lainnya yang ditemukan adalah ketidaktepatan waktu dalam publikasi berita oleh media *online*, yang seringkali menyebabkan informasi yang disampaikan terlambat sampai ke masyarakat. Berita tentang Rapat Paripurna ke LXXXVIII (88) dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024, berita yang dipublikasikan oleh salah satu media *online* yang bekerja sama dengan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan tersebut seharusnya dipublikasikan pada tanggal 28 Agustus 2024 tetapi kenyataannya dipublikasikan beberapa hari setelah tanggal pelaksanaan rapat paripurna itu dilaksanakan, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2024. Selain itu, berita lainnya juga mengalami keterlambatan publikasi, yang seharusnya dipublikasikan pada tanggal 8 Oktober 2024 tetapi kenyataannya dipublikasikan jauh setelah tanggal pelaksanaan rapat paripurna itu dilaksanakan, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2024. Permasalahan ini tentunya dapat menghambat transparansi, karena transparansi informasi publik mengharuskan informasi yang diberikan untuk masyarakat dapat diakses secara terjadwal dan benar.

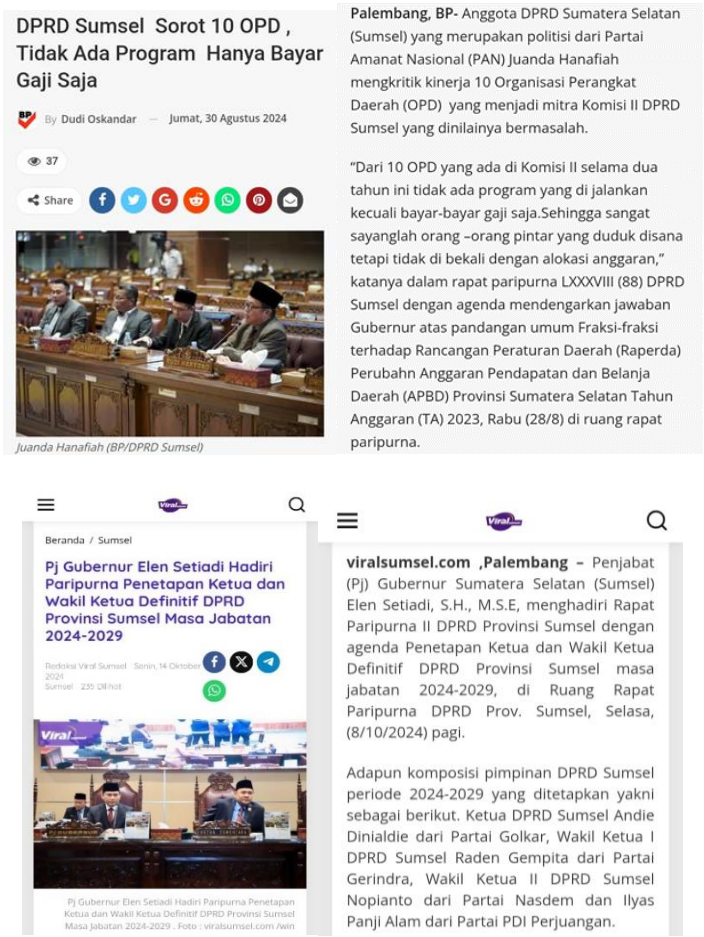

Gambar 1.3 Contoh Berita tentang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang Dipublikasikan Tidak Tepat Waktu

Sumber : ViralSumsel.com, beritapagi (2025)

Selain masalah keterlambatan, masalah lainnya yang ditemukan adalah penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Berita yang dipublikasikan sering kali menggunakan istilah-istilah yang bersifat teknis atau jargon administratif yang tidak familiar bagi *audiens* luas. Ketidakmampuan masyarakat untuk memahami istilah-istilah tersebut dapat menurunkan kualitas transparansi, karena informasi yang seharusnya dapat diakses secara luas menjadi terbatas hanya untuk kelompok tertentu yang memahami istilah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini, kalimat "mempertimbangkan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB yang mulai diterapkan pada tahun 2025" bisa dianggap kurang jelas bagi sebagian orang, terutama bagi yang tidak familiar dengan istilah teknis seperti "Opsen PKB" dan "Opsen BBN-KB". Seharusnya kalimat ini dapat diperjelas dengan memberikan penjelasan singkat tentang maksud dari "Opsen PKB" dan "Opsen BBN-KB". Misalnya, kalimat tersebut bisa diubah menjadi "mempertimbangkan pilihan pajak kendaraan bermotor (Opsen PKB) dan pilihan bea balik nama kendaraan bermotor (Opsen BBN-KB) yang akan mulai diterapkan pada tahun 2025." Dengan perubahan ini, pembaca yang tidak familiar dengan istilah teknis tersebut dapat lebih mudah memahami maksud dari kalimat tersebut.

Gambar 1.4 Contoh Berita tentang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang Menggunakan Istilah Teknis

Sumber : suarasumsel.id (2025)

Secara keseluruhan, masalah-masalah yang terjadi dalam strategi *media relations* Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini menunjukkan bahwa ada banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan transparansi informasi publik. Untuk meningkatkan efektivitas *media relations*, diperlukan upaya untuk memperbaiki kecepatan dan ketepatan waktu dalam publikasi berita, mempublikasikan berita secara berkala, memastikan akurasi informasi yang disampaikan, menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh semua orang, serta adanya fitur interaktif seperti forum diskusi atau mekanisme pengaduan online pada website resmi. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang humas juga menjadi faktor kunci untuk menjamin pemberitaan yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi *media relations* yang diterapkan oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Staf Humas melalui *media relations* dalam konteks ini perlu bekerja lebih keras untuk membangun dan meyakinkan masyarakat bahwa informasi yang

disampaikan tepat dan dapat diandalkan. Sebagai lembaga yang bertugas menjamin keberlangsungan hubungan positif antara DPRD dan masyarakat, Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus mampu menyesuaikan strategi *media relations* yang tepat guna dalam meningkatkan transparansi informasi publik.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengidentifikasi strategi *media relations* yang diterapkan oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan transparansi informasi publik, serta mengevaluasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasinya. Kajian ini harapannya bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu administrasi publik, termasuk dalam aspek pengelolaan informasi dan komunikasi di sektor pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Strategi *Media Relations* Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Transparansi Informasi Publik?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi *Media Relations* Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Transparansi Informasi Publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan informasi dan menambah wawasan serta dapat menjadi dasar bagi studi lain di bidang administrasi publik, khususnya terkait strategi *media relations* humas dalam memperkuat transparansi lembaga pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan perannya melalui *media relations* untuk memastikan keterbukaan informasi yang mendukung pengelolaan administrasi publik secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, K., Hermintoyo, H., & Astuti, S. P. (2022). Analisis Sarana Kohesi Leksikal dalam Teks Berita Humas di Website Kanwil Kemenag Jawa Tengah. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, *17*(1), 111-125.

Arifin, M. (2017). Strategi Manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin di perguruan tinggi. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *3*(1).

Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, *14*(2), 594-605.

Assidiqie, J. (2003). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945. *Yogyakarta: FH UII Press*.

Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, *3*(02).

Erduandi. (2018). Strategi Public Relation Dalam Membangun Hubungan Dengan Media Massa. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, *15*(2), 35–41.

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, I., Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami., & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi*.

Gandini, S. I., & Handayani, A. (2024). Analisis Kinerja Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *3*(7), 45-57.

Giffari, M. F., Wiyati, E. K., Andriani, F., & Putri, C. E. (2024). Peran Humas Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada PPID Kemendikbudristek. *Jurnal Cyber PR*, *4*(2), 119-131.

Hidayat, D. (2014). Media Public Relations: Pendekatan Studi Kasus Cyber Publik Relations Sebagai Metode Kerja PR Digital (Cetakan ke, Vol. 148). *Yogyakarta: Graha Ilmu*.

Ilaf, N., & Candrasari, S. (2022). Strategi Media Relations PT XL Axiata Tbk Dalam Menjalin Hubungan Baik Dengan Media Massa. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, *9*(1), 1-8.

Jayanti, N. W. D. B. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, *3*(2), 51-58.

Jefkins, F. (2000). Public Relations. *Jakarta: Erlangga*.

Kilmanun, F. W., & Sopacua, Y. (2024). Strategi Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara dalam Pengelolaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura*, *3*(1), 518-538.

Kolianan, J. B., Liliweri, A., & Tamunu, L. (2016). Strategi Media Relations Humas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (Kb) Pada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Provinsi Ntt. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 97219.

Konggoro, D., Valentine, F., & Destriani, D. (2022). Strategi Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah dalam Menyampaikan Informasi kepada Masyarakat. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, *7*(1), 29-44.

Kotler, P., Armstrong, G., & Philip Kotler, G. A. (2010). Principles of Marketing (Sally Yagan (ed.); 14th ed.). Pearson education.

Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance BPPN.

Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. *Jakarta: Rineka Cipta*.

Kuncoro, Mudrajad. (2016). Strategi: Bagaimana meraih Keunggulan Kompetetif. *Jakarta:Erlangga*.

Loing, N. V. M., Himpong, M. D., & Kalesaran, E. R. (2020). Strategi Humas dalam Menangani Krisis Perusahaan di PT. Air Manado (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Mahakeret Barat Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, *2*(4).

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor publik. *Andi: Yogyakarta*.

Mulyana, I. (2010). Manajemen dan Kehidupan Manusia. *Yogyakarta: Kanisius*.

Nisa, T. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Rasio Likuiditas, dan Umur Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan

Keuangan (Study Empiris Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Utilitas, Transportasi, Sektor Konsumsi, Sektor Pertambangan, dan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Journal of Enterprise and Development (JED)*, *2*(2), 27–37.

Pandiangan, C. U. A., & Ratnasari, E. (2023). Humas Pemerintah dan Transparansi Informasi untuk Membangun Kepercayaan Publik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, *7*(2), 155-168.

Praminingtyas, S. D. (2015). Manajemen strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba (studi pada implementasi oleh badan narkotika nasional provinsi jawa timur). *Publika*, *3*(3).

Prayogi, D., & Prawijaya, A. (2022). Strategi Media Relations Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur dalam Peningkatan Sarana Informasi Publik. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, *2*(2), 115-131.

Priyatna, C. C., Prastowo, F. A. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, *8*(1), 114-127.

Ramadani, S., Majid, A., & Amir, I. F. (2024). Tantangan Media Relation Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Meningkatkan Akses Keterbukaan Informasi Publik Pada Kalangan Mahasiswa Kota Makassar. *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, *5*(3), 62-69.

Ruslan, R. (2006). Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. *Jakarta: PT Rajagrafindo Persada*.

Sheviola, N. S., & Andiyansari, P. (2024). Strategi Media Relations Humas Diskominfo Kabupaten Sleman dalam Menjalankan Fungsi Publisitas pada Media Massa. *Hikmah*, *18*(2), 267-288.

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.

Tanjung, A. H. (2014). Akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan publik. *Yogyakarta: BPFE UGM*.

Taufiqurrohman, A., & Luthfi, M. (2024). Strategi Media Relation Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam Meningkatkan Citra Lembaga. *INTELEKTUAL (E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi)*, *11*(2), 137-144.

Ulumiyah, P. R. U. R., & Gati, R. A. (2024). Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan dalam Pelayanan Informasi Publik pada Portal Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 41-58.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wardhani, D. (2008). Media Relations: Sarana Membangun reputasi Organisasi. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*

Wijaya, A. P., Reza, F., Lathifah, N., Ilham, Y., Lestari, A., & Putri, S. H. (2024). Strategi Media Relations Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung. *In Search (Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism)*, *23*(1), 116-124.

Yogiswara, P. K., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2014). Peranan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung). *Citizen Charter*, *1*(2), 28600.